

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Indonesia merupakan salah satu Negara dengan tingkat kebutuhan akan produk otomotif yang tinggi. Faktor yang mendorong kebutuhan tersebut adalah meningkatnya kelas menengah Indonesia yang kini tumbuh hingga mencapai 50 juta orang. Selain itu, pendapatan per kapita berdampak pada meningkatnya kebutuhan energi akibat bertambahnya jumlah tempat tinggal, kegiatan industri, dan pergerakan orang serta barang. Di satu sisi industri otomotif Indonesia dituntut untuk selalu berinovasi menciptakan kendaraan yang murah dan hemat bahan bakar karena adanya persaingan di Kawasan Perdagangan Bebas (Free Trade Area).

Industri otomotif sebagai sarana transportasi darat memegang peran penting dalam ekonomi suatu Negara. Industri otomotif sebagai sarana transportasi publik, dan distribusi barang menopang pertumbuhan ekonomi dan teknologi bagi negara. Maka Indonesia perlu melihat pentingnya pengembangan industri otomotif.

Penulis menjawab rumusan masalah mengapa indonesia melakukan kerjasama dengan jepang terkait kebijakan Low Cost Green Car (LCGC) padahal disaat yang sama indonesia menjalankan proyek mobil nasional (MOBNAS):

1. Ratifikasi Protokol Kyoto sebagai alasan Pemerintah Indonesia untuk melakukan proyek LCGC. Dimana LCGC sebagai implementasi Protokol Kyoto dalam mengurangi emisi disektor transportasi.
2. Adanya ketergantungan Indonesia pada Jepang, Indonesia hanya mampu mengimpor mobil rendah emisi, tidak mampu melakukan transfer teknologi yang diatur kedalam LCGC. walaupun mekanisme JCM telah menawarkan insentif teknologi otomotif, tetapi belum ada implementasi untuk melakukan transfer teknologi. Sedangkan Ketergantungan pada impor mobil karena Indonesia dalam pengembangan mobnas yang tidak dapat mencapai kemandirian. Proyek mobil Nasional terkendala dengan Teknologi Industri yang belum mampu di kembangkan. Selain itu, mobnas selama ini tidak didukung oleh insentif teknologi oleh pemerintah Jepang.

Sehingga, terdapat kebijakan yang tumpang tindih antara implemetasi kebijakan Mobil Nasional dan Kebijakan LCGC. Kebijakan LCGC yang diterapkan bisa saja berjalan beriringan akan tetapi karena keterbatasan teknologi untuk memproduksi mobil low emission yang mengharuskan Indonesia mengimpor mobil dari luar negeri.

B. Saran

1. Indonesia harus mampu membuat posisi tawar bagi Jepang dalam mekanisme JCM, terutama dalam implementasi instentif teknologi otomotif, sehingga Indonesia mampu menciptakan kemandirian dalam proyek mobil nasional yang berbasis pada LCGC.

2. Pengembangan Mobil Nasional harus terus dilaksanakan karena mayoritas lapisan masyarakat mendukung penyelenggaraan proyek ini. Pemerintah harus berperan aktif dalam proses peningkatan teknologi terkini, sehingga pemerintah dapat mengembangkan proyek mobil nasional dengan teknologi LCGC, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kebijakan yang diimplementasikan oleh pemerintah Indonesia.
3. Pemerintah harus mampu menggunakan strategi politik dan diplomasi dalam pengembangan proyek mobil nasional, terutama dalam menekan impor mobil dan membuat posisi tawar Indonesia dalam dunia internasional tidak menciptakan ketergantungan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Ana Irhandayaningsih, Ide Mobil Nasional Sebagai Simbol Perlawanan terhadap Neokolonialisme di Era Globalisasi, 2005.

Arief Budiman. 2000 "Teori Pembangunan Dunia Ketiga". Penerbit PT Pustaka Utama. Jakarta.

Hariadi Kartodihardjo, Hambatan Struktural Pembaharuan Kebijakan Pembangunan Kehutanan Di Indonesia, 1999.

Lexy J. Moleong. 2014. "Metodologi Penelitian Kualitatif". Remaja Rosdakarya. Bandung.

Mansour Fakih. 2001. "*Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*". Insist. Yogyakarta.

Sugiono. 2009. "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*". ALFABETA. Bandung.

Syaidiman Suryohadjiprojo, 1987, "Belajar dari Indonesia: Manusia dan Masyarakat Jepang dalam Perjuangan Hidup", Universitas Indonesia Press, Jakarta.

Jurnal dan Majalah:

Abdul Kadir. "Transportasi: Peran dan Dampaknya dalam Pertumbuhan Ekonomi Nasional. Diunduh pada: [http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/15980/1/wah-apr2006-%20\(6\).pdf](http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/15980/1/wah-apr2006-%20(6).pdf). Tanggal 04 Oktober 2015.

Majalah Ditjen PEN/MJL/005/7/2014 Juli, Perkembangan otomotif Indonesia
http://djpen.kemendag.go.id/app_frontend/webroot/admin/docs/publication/1381421058063.pdf. Tanggal 05 Oktober 2015.

Internet dan Lainnya:

<https://chaderinsaputra.wordpress.com/2012/06/05/makalah-plsbt/>

<http://www.kemenperin.go.id/artikel/7185/Menatap-Kebijakan-Mobil-Murah>
diakses pada tanggal 04 Oktober 2015.

Sudaryanto, “*Perjanjian Internasional Di Era Globalisasi*”. Diunduh pada
<http://fakhukum.untagsmg.ac.id/images/makalah/PERJANJIAN%20INTERNASIONAL%20DI%20ERA%20GLOBALISASI.pdf>. Tanggal 18 Oktober 2015.

Vienna Convention dalam treaties.un.org. diunduh pada
<https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201155/volume-1155-I-18232-English.pdf>. Tanggal 18 Oktober 2015.

Artikel “Pertukaran Karbon, Perubahan Iklim, dan Protokol Kyoto” dari Future Harvest, 2002.

Koran Tempo, “Menimbang Mobil Esemka”, *section*: Pendapat, 10 Januari 2012.

<http://www.sinarharapan.co/news/read/150721037/produk-otomotif-ri-kurang-ekonomis>. Diakses pada tanggal 06 Desember 2015.

<http://www.kemlu.go.id/Daftar%20Perjanjian%20Internasional/japan.htm>

Produksi LCGC bertentangan dengan paket ekonomi”. Melalui <http://ekonomi.inilah.com/read/detail/2031414> diakses pada 13 November 2015

Hiyashinta Klise, Reportase “Insentif PPnBM terhadap *Low Cost Green Car*, 2013.

Majalah Karya Indoneisa Edisi 1, 2010, Kementerian Perindustrian, hal. 51.

Majalah Karya Indoneisa Edisi 1, 2010, Kementerian Perindustrian, hal. 6.

Zuhal, Gelombang Ekonomi Inovasi (edisi online), 2013.

<http://www.neraca.co.id/article/29433/regulasi-lcgc-hanya-dinikmati-pabrikan-jepang-kebijakan-salah-kaprah> diakses pada tanggal 01 Oktober 2015.

<http://www.kemenperin.go.id/artikel/6544/Komponen-Lokal-LCGC-80> diakses pada tanggal 18 November 2015.

<http://www.kemenperin.go.id/artikel/3575/Mobil-LCGC-Mesti-Diekspor>

<http://ilmupengetahuanumum.com/10-negara-yang-memiliki-kawasan-hutan-terbesar-di-dunia/>

<http://www.reddplus.go.id/berita/opini-dan-kajian/351-Insentif-ekonomi-karbon-hutan-rakyat-redd-sukses-lingkungan-hijau-masyarakat-sejahtera>

Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional

Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2004 Tentang Pengesahan Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change.